

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1. Tinjauan Pustaka

2.1.1 Teori Diplomasi

Setiap negara akan berusaha untuk mewujudkan apa yang menjadi kepentingan nasional mereka, dan Kepentingan Nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah mewujudkan cita-cita nasional dan juga tujuan nasional yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Dalam mendukung implementasi kepentingan nasional tersebut, dibutuhkan kerja sama dan juga peran aktif seluruh instrumen kekuatan negara yaitu politik, diplomasi, ekonomi, dan juga militer. (Simamora, 2013, hal 26) Sehingga, diplomasi merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk mencapai kepentingan nasional suatu bangsa.

Masyarakat internasional sekarang menyadari akan pentingnya praktik diplomasi dalam hubungan internasional. Hal tersebut disebabkan karena diplomasi dianggap penting bagi suatu negara bukan hanya untuk merumuskan suatu kebijakan luar negeri yang cocok dan efektif terhadap negara lain, tetapi juga sebagai metodologi dan mekanisme yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kebijakan luar negeri yang efisien (Suryokusumo, 2004, hal. 8). Diplomasi pada hakikatnya merupakan kebiasaan untuk melakukan hubungan antarnegara melalui wakil resminya dan dapat melibatkan seluruh proses hubungan luar negeri, perumusan kebijakan termasuk pelaksanaannya. Dalam arti luas, diplomasi dan politik luar negeri adalah sama. Akan tetapi, dalam arti sempit, diplomasi itu melibatkan cara-cara dan mekanisme, sedangkan dalam politik luar negeri ada dasar atau tujuannya. Sedangkan dalam arti yang lebih terbatas, diplomasi meliputi teknik operasional dimana negara mencari kepentingan di luar yuridiksinya.

Selanjutnya, Suryokusumo dalam bukunya menjelaskan beberapa definisi diplomasi dari beberapa pakar. Wellesley mendefinisikan diplomasi sebagai sarana untuk memberikan pengaruh terhadap

kebijakan. Dari pengertian ini, dapat disimpulkan bahwa diplomasi dan kebijakan merupakan dua hal yang berbeda. Kemudian, dijelaskan bahwa kedua hal tersebut saling melengkapi dan tidak dapat bekerja sendiri-sendiri. Sebagai contoh diplomasi tidak dapat dipisahkan dari kebijakan politik luar negeri suatu negara, akan tetapi keduanya merupakan kebijakan eksekutif, yaitu kebijakan yang menetapkan mengenai strategi, diplomasi, dan juga taktik. (Victor Wellesley dalam Suryokusumo, 2004, hal 7) Penjelasan lain mendefinisikan diplomasi sebagai penggunaan dari kecerdasan dan juga kebijaksanaan dalam melakukan hubungan resmi dengan pemerintah negara lain dan dilakukan dengan cara damai (Sir Ernest Satow, dalam Suryokusumo, 2004, hal. 7) Suryokusumo sendiri mendefinisikan diplomasi sebagai sebuah komunikasi yang dilakukan antara berbagai pihak yang terlibat dan di dalamnya juga terdapat negosiasi untuk mencapai tujuan ataupun untuk memperoleh dukungan mengenai prinsip-prinsip yang diambilnya (Suryokusumo, 2004, hal. 10).

Dalam buku "Tentang Ilmu Pertahanan", diplomasi diartikan sebagai suatu interaksi dan komunikasi antara dua pemerintah atau lebih (Supriyatno, 2014, hal. 161). Kemudian buku tersebut juga menjelaskan bahwa sebagai suatu proses komunikasi, diplomasi mempunyai dua elemen, pertama adalah negosiasi ketika kedua belah pihak membicarakan tentang suatu hal baik secara langsung maupun tidak langsung (melalui mediator). Kedua adalah memberikan tanda atau 'sinyal' (baik perkataan maupun perbuatan) dengan sangat intent dalam memberikan pesan kepada pemerintah atau pihak tertentu. Pada awalnya diplomasi diadakan untuk menghindari terjadinya perang atau konflik. Ultimatum juga merupakan salah satu cara diplomasi, tetapi apabila ultimatum tidak berhasil, maka perang akan terjadi. Kemudian dengan berkembangnya zaman, kini diplomasi berfungsi sebagai observasi, negosiasi, simbol kehadiran suatu pemerintahan, intervensi, dan berperan sebagai propaganda (Supriyatno, 2014, hal. 162).

2.1.1.1 Konsep Diplomasi Pertahanan

Kementerian pertahanan bertanggung jawab dan memiliki kewajiban untuk melaksanakan kegiatan diplomasi pertahanan. Diplomasi pertahanan merupakan pilar penting dalam mencapai tujuan kebijakan luar negeri suatu negara dalam bidang politik, ekonomi, serta bidang lainnya. Negara yang kuat dalam bidang pertahanannya, termasuk bidang diplomasi pertahanan, adalah negara yang mampu mencegah potensi ancaman dan ancaman aktual yang datang dari luar negara (Supriyatno, 2014, hal. 160). Selanjutnya, Supriyatno mengatakan bahwa diplomasi pertahanan dan kebijakan pertahanan itu sendiri merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, yaitu harus menentukan arah pada tujuan akhir yang ingin dicapai (*goal-ends*), bagaimana cara mencapainya (*ways*) dengan strategi (*strategies*) apa yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tersebut, serta alat (*means*) apa yang akan digunakan yaitu kemampuan (*capabilities*) yang harus dimiliki untuk mencapai tujuan tersebut.

Setiap negara memiliki kegiatan dan aktivitas diplomasi pertahanan yang berbeda-beda, hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor seperti perbedaan konstitusi, kepentingan nasional, kebijakan dan strategi nasional, kebijakan dan strategi pertahanan, dan pertimbangan strategis lainnya (Supriyatno, 2014, hal. 165). Pada kenyataannya, kegiatan atau aktivitas diplomasi pertahanan telah dilakukan sejak lama, namun istilah *Defense Diplomacy* sendiri baru dicetuskan pertama kali pada *Strategic Defense Review (SDR)* pada Departemen Pertahanan (MoD) Inggris yang diterbitkan pada tahun 1998 yang menyebutkan bahwa "*defense diplomacy*" adalah tugas "baru pertahanan" atau "*new missions*" sehingga, saat ini belum banyak definisi mengenai *defense diplomacy* (dalam Supriyatno, 2014, hal. 164). Dahulu, diplomasi dan pertahanan tidak dapat digabungkan dalam satu frasa, karena diplomasi identik dengan cara damai sedangkan pertahanan identik dengan militer atau penggunaan kekuatan. Akan tetapi, sekarang, terminologi diplomasi pertahanan sering digunakan dalam hubungan internasional ataupun politik internasional.

Dalam Simamora, pengertian mengenai diplomasi pertahanan disamakan dengan pengertian kerjasama internasional ataupun diplomasi militer. Diplomasi pertahanan adalah suatu seni untuk mencapai kepentingan nasional dengan menggunakan kemampuan dan sumber daya pertahanan (Simamora, 2013, hal. 28). Selain itu, diplomasi pertahanan juga didefinisikan sebagai semua metode dan strategi yang digunakan oleh negara yang mungkin sedang berkompetensi dengan negara lain, tetapi mereka telah menggunakan jenis praktik tertentu termasuk ekonomi, budaya, kerja sama politik, kerja sama pertahanan dan diplomasi untuk berteman, dengan harapan untuk bekerja sama satu sama lain, dan, yang paling penting untuk membangun dan meningkatkan rasa saling percaya (Pedrason, 2015, hal. 15). Sedangkan, dalam sumber yang lain, Cottey dan Foster mendefinisikan diplomasi pertahanan sebagai suatu kegiatan yang menggunakan kekuatan militer dalam masa damai dan infrastruktur terkait seperti menteri pertahanan sebagai alat dari kebijakan luar negeri maupun kebijakan keamanan (Cottey dan Foster, 2004, hal. 6).

Selanjutnya, Cotter dan Foster (2004) menjelaskan bahwa di masa lalu, diplomasi pertahanan mencakup berbagai kegiatan yang mungkin telah digambarkan sebagai kerjasama militer atau bantuan militer. Secara historis, kerja sama dan bantuan militer sebagian besar merupakan bagian dari realpolitik internasional, keseimbangan politik kekuasaan dan pencapaian kepentingan nasional. Negara yang terlibat dalam kerja sama pertahanan dan memberikan bantuan militer ke negara lain, dilakukan untuk mengimbangi atau menghalangi musuh, menjaga lingkungan pengaruh, mendukung rezim yang ramah dalam menekan lawan-lawan domestik atau mempromosikan kepentingan komersial seperti perdagangan senjata. Akan tetapi, terjadi pergeseran pada dekade terakhir yaitu kerjasama pertahanan sekarang tidak hanya digunakan dalam peran realpolitik untuk mendukung angkatan bersenjata dan keamanan sekutu, namun juga sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan kebijakan luar negeri dan keamanan yang lebih luas (Cotter dan Foster ,

2004, hal. 6-8). Lebih jelasnya perkembangan ini dibedakan menjadi tiga bagian, pertama, berbeda dengan penggunaan lama mereka yaitu sebagai alat untuk menyeimbangkan musuh, kerja sama dan bantuan militer sekarang digunakan untuk membantu membangun hubungan kerjasama dengan mantan atau musuh potensial (*strategic engagement: defense diplomacy as a means of conflict prevention*). Kedua, menggunakan kerjasama dan bantuan militer untuk mempromosikan kontrol sipil yang demokratis terhadap angkatan bersenjata (*promoting democratic civil-military relation*). Dan terakhir yaitu untuk mendukung negara lain dalam mengembangkan kapasitas untuk berkontribusi terhadap operasi penjaga perdamaian dan penegakkan perdamaian (*enhancing regional peacekeeping capabilities*) (Cotter dan Foster, 2004, hal. 13).

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi kemerdekaan dan kedaulatan setiap negara di dunia, dan mengedepankan penyelesaian konflik secara damai yaitu dengan upaya diplomasi. Tujuan diplomasi pertahanan antara lain adalah sebagai kehadiran atau perwakilan (*representation*), sebagai daya tangkal (*deterrence*) dengan memberikan penerangan tentang aoa yang kita kerjakan (*transforming the way we work*), melakukan negosiasi dan posisi tawar (*negosiation and bargaining position*), meningkatkan kemampuan (*increasing capability*), meningkatkan kredibilitas (*increasing credibility*), menurunkan keinginan negara yang berbeda kepentingan untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan (*decreasing opponent's stakes*), pengumpulan data intelijen atau informasi dan laporan (*information gathering or intelligence*), membentuk opini publik (*to form public opinion*), mempromosikan hukum internasional (*to promote international law*), membangun saling percaya (*confidence building measures*) atau *trust building*, dan sebagai pengembangan wilayah (Simamora, 2013, hal. 31).

Adapun Diplomasi pertahanan meliputi beberapa kegiatan seperti di bawah ini: (Cottey and Foster, 2004, hal. 7)

- a. Hubungan bilateral maupun multilateral antara personil militer dan pejabat sipil pertahanan
- b. Penempatan atase pertahanan di luar negeri
- c. Perjanjian kerjasama pertahanan secara bilateral
- d. Pelatihan personil pertahanan militer dan sipil asing
- e. Ketentuan atas para ahli dan saran mengenai kontrol demokratis atas angkatan bersenjata, manajemen pertahanan, dan bidang teknis militer
- f. Interaksi dan pertukaran antara personil militer dan unit, dan kunjungan kapal
- g. Penempatan personil militer ataupun sipil di kementerian pertahanan atau pasukan militer di negara sahabat
- h. Penyebaran tim pelatihan
- i. Ketentuan atas peralatan militer dan materi bantuan lainnya
- j. Pelatihan militer secara bilateral ataupun multilateral

Selanjutnya, keberhasilan strategi suatu negara merupakan kolaborasi dari komponen diplomasi, pertahanan, dan juga pembangunan. Akan tetapi, ada 3 karakter utama dari diplomasi pertahanan suatu negara, yaitu *Defense Diplomacy for Confidence Building Measures (CBM)*, *Capacity Building*, dan *Defense Industry* (Multazam, 2010, hal. 10). Pertama, *confidence building measures (CBM)* dilakukan untuk membangun hubungan baik antara negara satu dengan negara yang lainnya, dan utamanya dilakukan untuk menghilangkan mispersepsi antar negara atau menurunkan ketegangan dengan cara saling terbuka dalam kebijakan negara, saling transparansi dalam pengembangan kemampuan atau kapabilitas militer, agar apa yang sedang dan telah dilakukan suatu negara tidak dianggap sebagai ancaman bagi negara lain. Dengan kata lain, CBM dilakukan untuk meningkatkan dan menunjukkan rasa kepercayaan diantara kedua belah pihak atau kedua negara (Multazam,

2010, hal. 45). Menurut Acharya (2011), CBM memiliki beberapa tujuan, antara lain: (hal. 8)

- a. Mengurangi ketegangan dan kecurigaan;
- b. Mengurangi resiko perang secara tidak sengaja atau yang disebabkan oleh kesalahan dalam perhitungan;
- c. Membina komunikasi dan kerjasama dengan cara yang membantu dalam pencegahan penggunaan kekuatan militer;
- d. Membawa pemahaman yang lebih baik tentang masalah keamanan dan prioritas pertahanan satu sama lain; dan
- e. Mengembangkan rasa kepercayaan strategis yang lebih besar di kawasan.

Selanjutnya, terdapat tiga jenis tindakan yang perlu dilakukan dalam praktik diplomasi pertahanan untuk CBM yang meliputi: (Acharya, hal. 8-9)

- a. *Principles/Declaratory Measures*, yakni pernyataan umum mengenai kepentingan, norma dan kepercayaan yang didukung oleh sekelompok negara sebagai dasar untuk menjalin hubungan antar negara.
- b. *Constraints*, yakni kesepakatan bersama yang bersifat timbal balik mengenai pembatasan aktivitas militer yang dilakukan secara signifikan oleh pihak tertentu karena jika dibiarkan akan meningkatkan potensi konflik.
- c. *Transparency*, yakni pembukaan akses informasi mengenai postur, kemampuan dan kebijakan nasional negara-negara di bidang militer dan bidang terkait lainnya dengan maksud untuk mengurangi kecurigaan dan kesalahpahaman di antara negara yang bersangkutan.
- d. *Verification*, yakni tindakan yang dirancang untuk mengkonfirmasi atau memverifikasi dari aspek kepatuhan negara terhadap perjanjian tertentu (Higgins, hal. 2)

Sedangkan menurut Baviera (2001, hal. 4), ukuran dan bentuk pelaksanaan CBMs, dirangkum sebagai berikut:

Tabel 2.1. Indikator *Confidence Building Measures*

Military CBM's	Unilateral	Bilateral	Multilateral
Communication		Hotlines, regular, bilateral dialogue	Track two dialogues
Transparency	Defense white paper, arms registry, notification measures	Observance at military exercises, intelligence exchange	Common outline for defence publications
Consultation		Joint Commission	ARF, ASEAN Senior Official Meeting
Goodwill	Policy of non interference in internal affairs	Visit, cross training code of conduct	Code of conduct
Economic CBM	Aid investment	Preferential term of trade	
Socio Cultural CBM's		Increase people to people links	
Political CBM's	Curbing Propaganda	Contacts between political parties, parliaments, judiciary	

Dalam mengukur suatu *transparency*, Acharya (2011) menjelaskan beberapa aktivitas yang dapat dilakukan, yaitu publikasi Buku Putih Pertahanan, daftar kegiatan militer, pertukaran informasi militer, kontak militer ke militer, dan *surveillance* dan zona kontrol (hal. 9). Adapun tujuan akhir dari CBMs adalah timbulnya rasa saling percaya yang penuh dan tinggi antar negara sehingga ketegangan dapat dikurangi bahkan dapat dihilangkan. Hal ini penting karena kecurigaan dan kecemasan yang dimiliki oleh suatu negara tidak akan membawa hubungan yang baik dan stabil dengan negara lainnya. Kemudian, peneliti menggunakan indikator CBM yang dijabarkan oleh Baviera dalam menjawab rumusan masalah nomor satu.

Karakter diplomasi pertahanan yang kedua adalah *defense diplomacy for capacity building* dilakukan untuk meningkatkan kapabilitas pertahanan kedua negara secara material. Pengembangan kemampuan atau kapabilitas pertahanan perlu untuk dilakukan oleh negara karena sistem internasional yang bersifat anarki dimana tidak ada kekuasaan atau otoritas yang lebih tinggi di atas negara itu sendiri, sehingga serangan dari negara lain dengan tujuan untuk mencapai kepentingannya menjadi sangat mungkin terjadi. Adapun diplomasi dalam tatanan ini dilakukan semata-mata untuk memperkuat kapabilitas pertahanan dalam menghadapi ancaman potensial. Dalam hal ini peran diplomasi adalah memungkinkan sebuah negara untuk dapat melakukan pembelian senjata dari negara lain dengan tujuan untuk pengembangan kekuatan pertahanan negara. Idil Syafwi (2009) menjelaskan kegiatan diplomasi pertahanan dalam tatanan *capacity building* sebagai berikut: (Multazam, 2010, hal. 20)

- a. Usaha-usaha kerjasama strategis dalam hal bantuan militer.
- b. Pembelian alutsista, kredit ekspor.
- c. Pembangunan pangkalan militer.
- d. Pemberian *security umbrella* baik yang dilakukan oleh negara *core* ke negara *periphery* maupun sebaliknya.

Kegiatan diplomasi pertahanan dalam tatanan *capacity building* akan berpacu pada indikator yang dijabarkan oleh Idil Syafwi diatas untuk menjawab rumusan masalah nomor dua. Akan tetapi hal tersebut juga mengacu pada kebutuhan yang diperlukan oleh Indonesia yang akan dianalisa pada saat penelitian dilakukan. Pada poin c dan d tidak akan dijadikan objek penelitian dikarenakan Indonesia tidak menginginkan adanya pembangunan pangkalan militer oleh asing ataupun pemberian *security umbrella* (Firmansyah, 2017). Hal ini akan dipertegas dan disesuaikan dengan hasil wawancara maupun studi pustaka yang lebih dalam pada proses pengambilan data.

Karakter selanjutnya adalah *defense diplomacy for defense industry* dimana diplomasi pertahanan berperan untuk pembangunan dan penguatan industri pertahanan suatu negara serta menghilangkan interdependensi atas negara lain. Selain itu, diplomasi pertahanan dalam hal ini juga memberikan keuntungan ekonomi bagi negara-negara yang terlibat dalam kerjasama tersebut (Multazam, 2010, hal. 52). Diplomasi dalam tatanan ini dilakukan dengan cara sebagai berikut: (Gindarsah, 2015)

- a. Pengadaan alat utama sistem pertahanan negara (alutsista).
- b. Penyeimbangan teknologi persenjataan, melalui kesepakatan transfer teknologi dalam kesepakatan pembelian alutsista.
- c. Kerjasama penanaman investasi dalam pembangunan industri pertahanan.
- d. Pelaksanaan program penelitian dan pengembangan bersama.

Kemandirian bidang pertahanan khususnya industri pertahanan perlu ditingkatkan, karena salah satu yang menjadi faktor kurangnya kemandirian TNI adalah masih tingginya ketergantungan TNI pada sistem persenjataan, peralatan dan juga perlengkapan militer yang selama ini didapatkan dari luar negeri (Shoelhi, 2009, hal. 52). Sehingga, saat ini dalam pasal 43 Tahun 2012 mengenai Industri Pertahanan yang menjelaskan bahwa pembelian alat peralatan dan keamanan dalam

negeri, dari negara lain, dapat dilakukan dengan syarat alat peralatan tersebut belum dapat dipenuhi oleh industri pertahanan dalam negeri (Undang-undang Nomor 16 tahun 2012 mengenai Industri Pertahanan, 2012). Akan tetapi, dalam kerjasama pertahanan Indonesia dengan AS tidak melibatkan industri pertahanan dalam negeri, sehingga karakteristik ketiga ini tidak menjadi fokus dalam penelitian ini. Karakter diplomasi pertahanan yang dijadikan objek dalam penelitian ini adalah *defence diplomacy for confidence building measures* (CBMs) dengan menggunakan pengklasifikasian yang dijabarkan oleh Baviera mengenai bentuk pelaksanaan CBMs itu sendiri. Kemudian, *defense diplomacy for defense capabilities* dengan menggunakan penjabaran Idil Syafwi pada kegiatannya.

2.1.2 Teori Kerjasama Internasional

Gambaran pola hubungan atau interaksi antar negara dibagi menjadi 2 bentuk yaitu konflik dan kerjasama. Adapun bentuk interaksi lain yang berada pada situasi diantara keduanya, yaitu persaingan. Hubungan antar negara tersebut terbentuk karena sifat suatu negara atau masyarakat. Konflik sendiri merupakan suatu kondisi dimana adanya suatu perbedaan pendirian antar kelompok, salah satunya meliputi posisi yang ingin dicapai. Sedangkan kerjasama adalah persetujuan atau masalah tertentu antara dua negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan kepentingan yang dimiliki oleh dua negara atau lebih (Holsti, 1995, hal. 392-394).

Dalam melakukan hubungan dengan negara lain, Indonesia menganut politik luar negeri yang bebas aktif dimana dalam membangun kerjasama internasional berpedoman pada prinsip negara non blok yaitu tidak melakukan aliansi dengan negara manapun, akan tetapi Indonesia tetap aktif dalam kerjasama internasional demi menciptakan kawasan yang damai baik secara regional maupun global (Buku Putih, 2015, hal. 71). Pada hakikatnya, tidak ada negara yang dapat hidup sendiri dan mampu mencukupi semua keperluan negaranya sendiri, dan tidak ada

pula negara yang merasa tidak membutuhkan untuk berinteraksi dengan negara lainnya. Sehingga, dibutuhkanlah kerja sama yang terjalin antara satu negara dengan yang lainnya. Akan tetapi, kerjasama internasional bukan berarti menyerahkan semua yang dimiliki kepada negara lain. Menurut Yudhoyono, kerjasama internasional adalah upaya bersama untuk meraih tujuan dan kepentingan masing-masing pihak menurut ketentuan yang ada dan disepakati bersama. Selanjutnya, Ia menjelaskan bahwa kerjasama bukan merupakan pilihan utama, melainkan pilihan yang jatuh apabila kepentingan nasional mustahil dapat dicapai dengan upaya sendiri, sehingga kepentingan itu perlu dicapai melalui kerjasama (Shoelhi, 2009, hal. 42-43).

Menurut pandangan Holsti (1995, hal. 362), terdapat beberapa faktor penyebab negara melakukan kerjasama dengan negara lainnya, yaitu:

- a. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi serta mengurangi biaya yang harus ditanggung dalam memproduksi suatu produk kebutuhan bagi rakyatnya.
- b. Meningkatkan efisiensi yang berkaitan dengan pengurangan biaya.
- c. Meningkatkan keamanan negara.
- d. Mengurangi kerugian negatif yang diakibatkan oleh tindakan-tindakan individual negara yang memberi dampak terhadap negara lain.

Soeprapto (1997) menjelaskan bahwa kerjasama internasional terbagi menjadi empat bentuk, yaitu:

- a. Kerjasama tingkat global, yaitu suatu kerjasama yang dilakukan dalam suatu wadah yang mampu mempersatukan cita-cita bersama.
- b. Kerjasama tingkat regional, yaitu sebuah kerjasama yang ruang lingkungannya antara negara dalam satu wilayah. Sebagai contoh adalah kerjasama antar negara-negara Eropa Barat yaitu Uni

Eropa atau kerjasama antara negara di wilayah Asia Tenggara yaitu ASEAN.

- c. Kerjasama fungsional, yaitu permasalahan maupun metode kerjasama menjadi semakin kompleks disebabkan oleh semakin banyaknya berbagai lembaga kerjasama yang ada. Walaupun kompleksitas dan banyak permasalahan yang dihadapi dalam kerjasama jenis ini, baik dalam bidang ekonomi maupun sosial, untuk pemecahan permasalahan diperlukan kesepakatan dan keputusan politik.
- d. Kerjasama ideologi, dalam kerjasama ini batas-batas teritorial tidaklah relevan. Terdapat berbagai kelompok kepentingan yang berusaha mencapai tujuannya dengan memanfaatkan berbagai kemungkinan yang terbuka di forum global.

2.1.2.1 Kerjasama pertahanan

Seperti yang disebutkan dalam Buku Putih Pertahanan Indonesia (2015) Kerjasama antar negara merupakan salah satu bidang penting dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Selain itu, kerjasama pertahanan juga dilakukan demi mencapai kepentingan nasional suatu negara di bidang pertahanan. Kerjasama pertahanan diselenggarakan untuk membangun rasa saling percaya antar negara lain dengan prinsip saling menghormati kedaulatan negara lain, tidak mencampuri urusan dalam negeri, saling menguntungkan, dan juga sebagai modalitas dalam mencegah terjadinya konflik dengan negara lain. Lebih jauh lagi, tujuan dilakukannya kerjasama pertahanan yaitu untuk membangun kemampuan pertahanan bagi peningkatan profesionalisme prajurit TNI melalui bidang pendidikan, latihan, dan kerjasama industri pertahanan (Buku Putih, 2015, hal. 71).

Kebijakan kerjasama internasional negara Indonesia di bidang pertahanan mengacu pada beberapa peraturan, antara lain: (Simamora, 2013, hal. 45-46)

- a. Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang menyatakan "... dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial..." pernyataan ini menjadi dasar pengiriman pasukan pemeliharaan perdamaian ke seluruh penjuru dunia.
- b. Undang-undang RI nomor: 37 Tahun 1999 tentang hubungan luar negeri. Pasal 5 ayat 3 menyatakan "Politik luar negeri menganut prinsip bebas aktif yang diabdikan untuk kepentingan nasional". Dan pasal 5 ayat 4 menyatakan bahwa "Politik luar negeri dilaksanakan melalui diplomasi yang kreatif, aktif, dan antisipatif, tidak sekedar rutin dan reaktif, teguh dalam prinsip dan pendirian, serta rasional dan luwes dalam pendekatan".
- c. Undang-undang RI Nomor: 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional. Dalam pasal 3 menyebutkan bahwa "Pemerintah RI mengikatkan diri pada perjanjian internasional melalui cara-cara, seperti penandatanganan, pengesahan, pertukaran dokumen perjanjian/nota diplomatik, dan cara-cara lain sebagaimana disepakati para pihak dalam perjanjian internasional". Pada pasal 4 ayat 1 disebutkan bahwa "Pemerintah RI membuat perjanjian internasional dengan satu negara atau lebih, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lain berdasarkan kesepakatan, dan para pihak berkewajiban untuk melaksanakan perjanjian tersebut dengan itikad baik". Selanjutnya pada pasal 4 ayat 2 menyebutkan bahwa "Dalam pembuatan perjanjian internasional, pemerintah RI berpedoman pada kepentingan nasional dan berdasarkan prinsip-prinsip persamaan kedudukan, saling menguntungkan, dan memperhatikan baik hukum nasional maupun hukum internasional yang berlaku". Kemudian, sesuai dengan bunyi pasal 6 yang menyebutkan bahwa pembuatan DCA/MoU dengan negara mitra, selalui melalui tahapan penjajakan, perundingan, perumusan naskah, penerimaan, dan penandatanganan.

Dalam membuat sebuah kerjasama pertahanan, Indonesia memiliki dasar pemikiran kerjasama pertahanan. Terdapat tiga dasar pemikiran yang melandasi pembentukan kerjasama pertahanan, yaitu: (Simamora, 2013, hal. 50)

- a. Perkiraan ancaman (Threat assessment), maksudnya adalah setiap negara pasti memiliki perhitungan atau persepsi mengenai ancaman yang sedang atau akan dihadapi. Ancaman tersebut dapat datang dari dalam maupun luar negeri serta berasal dari *state actor* ataupun *non state actor*. Kemudian, dengan mengetahui ancaman tersebut, negara akan mengatur strategi pertahanan untuk menangkalnya.
- b. Situasi negara, yaitu perubahan lingkungan strategis sebuah negara turut serta menjadi faktor terbentuknya kerjasama pertahanan. Perubahan ini juga akan mempengaruhi peta kekuatan di wilayah yang terkait dan kemungkinan akan merubah pola hubungan antar negara.
- c. Perkembangan teknologi persenjataan. Alat persenjataan pertahanan dan keamanan merupakan salah satu penentu kekuatan militer suatu negara. Modernisasi alaphankam merupakan hal yang harus dilakukan oleh sebuah negara.

Kemudian, terdapat dua jenis kerjasama pertahanan yaitu secara bilateral dan secara multilateral. Kerjasama pertahanan secara bilateral dilakukan untuk merealisasikan diplomasi pertahanan, yang penyelenggaraannya lebih kepada untuk membangun rasa saling percaya (*trust building*), mencari solusi damai dalam menangani isu-isu keamanan yang menjadi perhatian kedua negara. Sedangkan, kerjasama multilateral dilakukan bersama dengan negara-negara yang berada baik di kawasan maupun internasional, seperti kerjasama dalam kerangka ASEAN, forum dialog regional maupun internasional, kerjasama dalam

mendukung misi perdamaian dunia, dan kerjasama dalam rangka bantuan kemanusiaan (Buku Putih, 2015, hal. 72-89).

Dalam penelitian ini, akan dibahas mengenai kerjasama bilateral antara Indonesia dengan Amerika Serikat di bidang pertahanan. Amerika Serikat merupakan salah satu mitra dalam pengembangan kapasitas kelembagaan, kemampuan operasional, profesionalisme sumber daya, manusia, dan juga modernisasi alutsista. Kerjasama kedua negara berada dalam pengaturan kerangka kerjasama tentang Kegiatan-Kegiatan Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan (*Framework Arrangement on Cooperative Activities in the field of Defense*) antara Kemhan RI dan Departemen Pertahanan AS. Persetujuan kerjasama ini ditandatangani pada tahun 2010 lalu. Bidang kerjasama yang dikembangkan meliputi dialog dan konsultasi bilateral mengenai isu-isu keamanan yang menjadi perhatian bersama, meningkatkan sumber daya manusia pada institusi pertahanan dan angkatan bersenjata kedua negara melalui pendidikan dan pelatihan, proyek pengembangan kapasitas tentang keamanan maritim, dan juga kerjasama logistik dan persediaan militer.

Kerjasama kedua negara dalam bidang pertahanan diimplementasikan dalam bentuk: *Indonesia-United States Security Dialogue (IUSSD)*, *United States-Indonesia Bilateral Defense Dialogue (USIBDD)*, *Military Assistance Program (MAP)*, *International Military Education and Training (IMET)*, *Foreign Military Sales (FMS)*, dan *Foreign Military Finance Program (FMFP)* (Buku Putih, 2015, hal. 81-83).

Mantan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan bahwa kerjasama pertahanan kedua negara terjalin berdasarkan persamaan kepentingan dan kemitraan yang setara, dan juga harus memberikan keuntungan yang nyata dan merata. Kerjasama bilateral ini terjadi untuk menjaga perdamaian, stabilitas dan keeratn kerjasama bagi pemantapan sistem internasional. Namun, AS juga harus menghormati prinsip politik Indonesia yang bersifat bebas aktif, dimana Indonesia dan AS selalu memiliki ruang untuk setuju atau tidak setuju (Shoelhi, 2009, hal. 72).

Disamping itu, segala kerjasama pertahanan yang dilakukan berlandaskan akan pertimbangan-pertimbangan akan kepentingan nasional yang melahirkan beberapa prioritas kerjasama internasional di bidang pertahanan, diantaranya;

- a. Peningkatan kerjasama dengan negara-negara tetangga yang berbatasan langsung dengan Indonesia melalui program yang mendorong penyelesaian perbatasan dengan cara damai
- b. Peningkatan kerjasama dengan negara-negara dengan mitra strategis yang berkomitmen tinggi dalam pengembangan kemampuan (*capacity building*) pertahanan negara Indonesia, secara khusus dalam upaya penanganan terorisme, kegiatan di bidang pendidikan dan pelatihan, pengembangan SDM, penanggulangan bencana, penegakan di laut dan udara, serta transfer teknologi untuk alutsista
- c. Akselerasi usaha-usaha untuk mewujudkan *ASEAN Security Community* yang kuat dan solid dalam mempromosikan nilai-nilai perdamaian, penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dan demokrasi dalam berbagai forum di ASEAN yang terbentuk
- d. Peningkatan peran aktif dalam *Peacekeeping Operation* (PKO) berdasarkan mandate Dewan Keamanan PBB, serta peran aktif dalam mewujudkan keamanan regional melalui ASEAN (Mirdanies dkk, 2013).

2.1.3 Konsep Geopolitik

Geopolitik berkembang pada awal tahun 1945. Teori ini semakin berkembang dan bahkan menjadi konsep terbaru seperti Geostrategi, Geoekonomik, hingga Geoteknologi (Said, 2015, hal. 6). Berbeda dengan geostrategi yang merupakan konsep yang mengaitkan geografi dan strategi militer, geopolitik lebih mengaitkan antara geografi dengan kekuasaan politik (*political power*) (Said, 2015, hal.7).

Studi geopolitik mencoba mengidentifikasi isu yang membentang dari kecenderungan abadi, kecenderungan yang sudah lama dianut dan

isu transisi antara dua kutub, hal ini dilakukan melalui prisma geografi berbasis kuasa atau kekuatan nasional (*national power*) (Said, 2015, hal. 7). Untuk lebih jelasnya, Said (2015) mendefinisikan geopolitik sebagai studi tentang hubungan kuasa (*power*) terdahulu, sekarang, dan yang akan datang. Geopolitik melibatkan studi hubungan mengenai politik, geografi, demografi, dan ekonomi, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan politik luar negeri suatu negara. Selanjutnya, geopolitik juga dijelaskan sebagai surat kuasa negara yang dapat mengontrol ruang atau teritori dan bentuk kebijakan politik luar negeri setiap individu negara dan hubungan politik internasional (Said, 2015, hal. 9). Bert mendefinisikan geopolitik sebagai penggambaran dari pengaturan geografis dan hubungannya dengan kekuatan politik dan penetapan kerangka kerja spasial yang mencakup unit kekuatan politik seperti samudra, batas daratan dan laut, sumber daya alam, dan juga budaya. Selanjutnya dijelaskan juga bahwa geopolitik bersifat dinamis, bukan statis. Hal ini mencerminkan realitas internasional dan konstelasi global yang timbul dari interaksi geografi di satu sisi dan teknologi serta pembangunan ekonomi di sisi lain (Bert, 2011, hal. 2-3).

Geopolitik memandang penting bagaimana faktor-faktor seperti geografi – yang didalamnya terdapat teritori, populasi, lokasi strategis, dan sumber daya alam – di bungkus dengan ekonomik dan teknologi yang kemudian akan mempengaruhi hubungan antar negara guna memandang tatanan dunia (Said, 2015, hal. 9). Dengan pengertian diatas, menjelaskan bahwa geopolitik adalah alat atau metode untuk menganalisis isu hubungan internasional, bukan alat untuk menganalisis kebijakan, dan problema versus isu politik hubungan internasional (Said, 2015, hal. 10).

Arus globalisasi merubah masyarakat internasional untuk mencari tatanan dunia baru. Tatanan lama sering diidentikkan dengan Blok Barat, Blok Timur dan non-Blok, atau negara maju, negara berkembang dan negara tertinggal, masa kini tatanan demikian dinilai tidak valid dan tidak relevan lagi. Dengan struktur masyarakat seperti itu, istilah lawan dan kawan pun mulai berubah, begitu pula dengan sumber konflik. Konflik

antar negara tidak lagi hanya bersumber dari ideologi, politik dan ekonomi, tetapi dapat juga berasal dari konflik antar nilai. Dalam memperjuangkan kepentingan nasional negara, paduan pertimbangan geopolitik dan geoekonomi menjadi faktor penting yang tidak bisa dikesampingkan (Shoelhi, 2009, hal. 41).

Pada abad 21, geopolitik terjadi dengan berbagai rupa, seperti gejala terorisme, serangan bom bunuh diri di Bali, penyanderaan oleh kelompok Somalia. Hal ini telah menggambarkan bagaimana tempat-tempat (baca: geografi) dan manusia di manapun saling terikat satu sama lain secara emosional dengan mudahnya (Said, 2015, hal. 8). Kesehatan ekonomi personal dan nasional, kemakmuran, dan keamanan fisik sangat dipengaruhi oleh geografi. Kecelakaan pasar subprime mortgage di AS pada tahun 2008 berdampak serius pada kondisi domestik dan global terhadap kinerja ekonomi dan kemakmuran personal. Kemudian, kerusuhan politik dan ketidakstabilan di satu negara atau wilayah dapat berdampak ke seluruh dunia, seperti daerah krisis di Afghanistan, Mesir, Korea Utara, dan Somalia (Bert, 2011, hal. 1).

Berdasarkan penjelasan mengenai geopolitik di atas, konsep ini dapat digunakan untuk memahami mengapa sebuah negara melakukan perjanjian kerjasama. Sebagai contoh, kerjasama pertahanan antara Indonesia dan AS yang sempat terputus akibat pemberlakuan embargo, dapat terjalin kembali karena AS mendukung transisi demokrasi dan reformasi Indonesia, serta menyambut baik kemajuan yang dicapai Indonesia menuju arah demokrasi yang matang dan stabil. Kedua negara sependapat bahwa Indonesia dapat menjadi contoh dimana demokrasi dan Islam dapat berjalan beriringan. Alasan lain atas terjalinnya kerjasama dua negara demokrasi ini karena pada saat itu AS sedang gencar melawan terorisme dan Indonesia merupakan negara Muslim terbesar yang juga memiliki persepsi sama atas ancaman terorisme. Selain itu, kerjasama yang terjalin antara kedua negara ini bertujuan untuk menjaga stabilitas kawasan, dimana AS berusaha untuk menjaga pengaruhnya di

Asia Tenggara tetap ada, dan Indonesia menjaga agar tidak ada dominansi antara AS ataupun China.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai tinjauan terhadap penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya guna mendapatkan perbedaan ataupun persamaan dengan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan tiga buah penelitian terdahulu yang berasal dari karya tulis berupa tesis dan juga jurnal.

Penelitian pertama mengenai diplomasi pertahanan Indonesia yang diteliti oleh Arifin Multazam pada tahun 2010 dengan judul “Diplomasi Pertahanan Indonesia terhadap Korea Selatan Periode 2006-2009”. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kegiatan diplomasi pertahanan yang dilakukan Indonesia terhadap Korea Selatan dalam kurun waktu empat tahun atau secara spesifik pada periode 2006 hingga 2009. Dalam penelitian ini diplomasi pertahanan dianalisis melalui konsep diplomasi pertahanan yang mengembangkan tiga karakter utama, yaitu *defense diplomacy for confidence building measure*, *defense diplomacy for capacity building*, dan *defense diplomacy for defense industry*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan diplomasi pertahanan Indonesia terhadap Korea Selatan semakin mempererat hubungan pertahanan kedua negara terutama setelah ditandatanganinya *Joint Declaration between the Republic of Indonesia and the Republic of Korea on Strategic Partnership to Promote Friendship and Cooperation in the 21st Century* (Multazam, 2010). Penelitian ini dijadikan acuan dalam menganalisa diplomasi pertahanan Indonesia yang mengembangkan tiga karakteristik utama. Dua dari tiga karakteristik diplomasi pertahanan yang digunakan dalam penelitian sebelumnya digunakan untuk menganalisa objek yang berbeda.

Penelitian kedua merupakan jurnal mengenai “*Indonesia’s Defence Diplomacy: Harnessing the Hedging Strategy Against Regional Uncertainties*” yang ditulis oleh Lis Gindarsih pada tahun 2015. Dalam

jurnal ini menganalisa bahwa Indonesia menghadapi perkembangan geopolitik dan keamanan kawasan, antara lain: Pertumbuhan kekuatan Tiongkok dan kebijakan *rebalancing strategy* Amerika; sengketa perbatasan laut yang menimbulkan ketegangan antara Tiongkok dan negara-negara ASEAN; Tren perlombaan pembangunan kekuatan militer di kawasan yang meningkatkan potensi perang; masalah keamanan tradisional dan non-tradisional yang mengancam Indonesia. Selanjutnya, Gindarsih menyebutkan bahwa kegiatan diplomasi pertahanan Indonesia baik multilateral maupun bilateral menunjukkan bahwa diplomasi pertahanan Indonesia digunakan untuk membangun rasa saling percaya, non-intervensi dan meningkatkan kemampuan militer serta industri pertahanan Indonesia (Gindarsih, 2015). Penelitian ini dijadikan acuan mengenai alasan terbentuknya suatu kerjasama pertahanan antara Indonesia dan AS.

Penelitian ketiga adalah tesis yang ditulis oleh Syinthia Fawaati dengan judul “Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam Kerjasama Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan *United States Defense Institutional Reform Initiatives*”. Penelitian ini mengatakan bahwa terdapat polemik dalam kerjasama yang terjalin antara Kemhan RI dengan U.S. DIRI karena dianggap terlibat langsung dalam proses penyusunan Renstra Pertahanan Indonesia (2015-2019). Kemudian penelitian ini menganalisis pertimbangan Indonesia dalam kerjasama ini dan juga kontribusi kerjasama bagi hubungan Indonesia dan Amerika Serikat. Kemudian penelitian ini menemukan bahwa dalam melakukan kerjasama melalui Kemhan RI, Indonesia mempertimbangkan kepentingan nasional berupa *capacity building* dan *trust building* yang dengan jelas tertera pada buku Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015. *Capacity building* ditujukan untuk meningkatkan manajemen pertahanan melalui SDM Kemhan RI dan TNI. *Trust building* diupayakan Kemhan RI sebagai pembelajaran pada preseden militer dimasa lalu. Kepentingan *trust building* tercapai dengan selarasnya kontribusi yang dihasilkan dari kerjasama. Kerjasama Kemhan RI dan U.S. DIRI berkontribusi pada peningkatan *confidence building*

Indonesia dan Amerika Serikat ditinjau dari aktivitas CBMs kedua negara. Penelitian ini dijadikan salah satu sumber mengenai kerjasama yang telah terbentuk antara Indonesia dan AS.

Terakhir merupakan tesis yang ditulis oleh Rr. Dhora Erdianawati dengan judul “Pencapaian *Confidence Building Measures* dalam Diplomasi Pertahanan Indonesia-Australia melalui Ikatan Alumni Pertahanan (Periode 2012-2014)”. Dinamika hubungan kedua negara menjadi latar belakang dari penelitian ini dan IKAHAN (Ikatan Alumni Pertahanan) menjadi objek dari penelitian ini. Penelitian ini membahas mengenai pencapaian CBMs dalam diplomasi pertahanan Indonesia dan Australia melalui IKAHAN dan menganalisa faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi CBMs kedua negara. Penelitian ini menjadi acuan peneliti dalam menganalisa pencapaian CBMs dalam diplomasi pertahanan Indonesia-AS.

Selanjutnya, dari keempat penelitian terdahulu tersebut dapat dilihat bahwa terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini, hal berikut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

	Judul	Penerbit, Tahun	Rumusan Masalah	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Arfin Multazam	Diplomasi Pertahanan Indonesia terhadap Korea Selatan Periode 2006-2009	Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Soisal dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Tahun 2010	Menggambarkan kegiatan diplomasi pertahanan yang dilakukan Indonesia terhadap Korea Selatan periode 2006-2009.	Kualitatif	Kegiatan diplomasi pertahanan Indonesia terhadap Korea Selatan semakin memperat hubungan pertahanan kedua negara terutama setelah ditandatanganinya <i>Joint Declaration between the Republic of Indonesia and the Republic of Korea on Strategic Partnership to Promote Friendship and Cooperation in the 21st Century</i>
Iis Gindarsah	<i>Indonesia's Defence Diplomacy: Harnessing The Hedging Strategy Against Regional Uncertainties</i>	S. Rajaratnam School of International Studies, Tahun 2015	Menganalisa diplomasi pertahanan Indonesia dalam ketidakpastian keamanan dan geopolitik di kawasan	Kualitatif	Diplomasi pertahanan Indonesia digunakan untuk membangun rasa saling percaya, non-intervensi dan meningkatkan kemampuan militer serta industri pertahanan Indonesia.
Rr. Dhora Erdianawati	Pencapaian <i>Confidence Building Measures</i> dalam Diplomasi Pertahanan Indonesia – Australia melalui Ikatan Alumni Pertahanan (Periode Tahun 2012-2014)	Program Pascasarjana Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan Indonesia tahun 2016	Menganalisa pencapaian <i>confidence building measures</i> (CBMs) dalam diplomasi pertahanan Indonesia Australia melalui IKAHAN dan menganalisa faktor-faktor apa saja yang	Kualitatif	CBM melalui IKAHAN pada tingkat pencapaian baik dengan empat indikator (goodwill, komunikasi, konsultasi, dan transparansi) pencapaian. Faktor-faktor yang

			berpengaruh pada CBMs Indonesia Australia		mempengaruhi CBM Indonesia-Australia adalah faktor internal seperti organisasi aktif, pertemuan rutin, bilateral meeting. Sedangkan external adalah kebijakan luar negeri, perbedaan persepsi, permasalahan di lapangan, dan pemimpin negara.
Synthia Fawaati	Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam Kerjasama Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan <i>United States Defense Institutional Reform Initiatives</i>	Program Pascasarjana Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Indonesia tahun 2017	Pertimbangan Indonesia dalam kerjasama dengan US DIRI dan kontribusi kerjasama tersebut terhadap hubungan Indonesia dan Amerika Serikat.	Kualitatif	Dalam kerjasama ini Indonesia mempertimbangkan kepentingan nasional seperti <i>capacity building</i> dan <i>trust building</i> yang berdasar pada Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015. Kontribusi dari US DIRI adalah meningkatkan <i>confidence building</i> Indonesia dan AS ditinjau dari aktivitas CBMs keduanya.
Firda Nuzulia	Diplomasi Indonesia dalam Meningkatkan Kerjasama Pertahanan Indonesia – Amerika Serikat tahun 2012-2017	Program Pascasarjana Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Indonesia tahun 2018	Diplomasi pertahanan Indonesia dalam meningkatkan kerjasama pertahanan Indonesia – AS tahun 2012-2017 ditinjau dari CBM, <i>capacity building</i> , dan <i>defense industry</i> .	Kualitatif	Diplomasi pertahanan yang telah dilakukan Indonesia terhadap AS perlu ditingkatkan pada indikator-indikator tertentu guna meningkatkan kerjasama pertahanan kedua negara.

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

2.3 Kerangka Pemikiran

Latar belakang dari penelitian ini berangkat dari adanya ketidaksetaraan dalam kerjasama pertahanan Indonesia dan AS dimana AS masih memberlakukan *Human Rights Vetting* terhadap militer Indonesia. Hal ini berlawanan dengan salah satu prinsip kerjasama pertahanan dimana kesetaraan dalam mencapai kepentingan bersama dan saling menguntungkan menjadi hal yang seharusnya diperoleh bagi kedua belah pihak yang terlibat. Disamping itu, isu-isu internal yang terjadi di Indonesia, maupun isu yang terjadi dalam hubungan Indonesia-AS yang dapat mempengaruhi persepsi masing-masing negara dan berdampak pada *confidence building* keduanya.

Dalam menganalisis diplomasi pertahanan Indonesia dalam meningkatkan kerjasama pertahanan Indonesia-AS ini akan digunakan konsep dari diplomasi pertahanan yang mengembangkan dua karakteristik utama yaitu CBM dan *capacity building*. Sedangkan konsep kerjasama pertahanan digunakan untuk menganalisa kerjasama pertahanan yang berlangsung di kedua negara tersebut dan konsep geopolitik digunakan untuk menganalisa alasan kedua negara membentuk kerjasama pertahanan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penilaian terhadap diplomasi pertahanan Indonesia dalam tatanan CBM dan *capacity building* dalam kerjasama pertahanan Indonesia-AS (2012-2017) yang kemudian akan memberikan rekomendasi bagi para pemangku maupun pelaksana kebijakan agar peningkatan kerjasama pertahanan Indonesia-AS khususnya dalam hal kesetaraan dapat tercapai.

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

**“Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam meningkatkan kerjasama
Pertahanan Indonesia–Amerika Serikat periode 2012-2017”**



